

## EXECUTIVE SUMMARY



**P**eran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mewujudkan visi Indonesia 2025 “Indonesia Maju dan Modern” yaitu mengangkat Indonesia menjadi negara maju berperingkat 10 besar dunia pada tahun 2015 dilakukan melalui terwujudnya Indonesia yang *locally integrated, globally connected*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4/PER.M/KOMINFO/03/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika terdapat 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Ringkasan pencapaian IKU pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2011 sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika 2011 disampaikan pada tabel di bawah ini. Adapun uraian pencapaian sasaran (18 sasaran) pembangunan komunikasi dan informatika dielaborasi lebih jauh pada Bab III.

### Pencapaian Pembangunan Komunikasi dan Informatika 2011 Sesuai Sasaran

No.	Indikator Sasaran	2010	2011	
		Capaian	Target	Realisasi
1	Akses komunikasi dan informatika yang merata di seleuruh Indonesia (Desa Dering)	80,62% (26.753 desa)	100 % (33.184 desa)	91,73% (30.441 desa)
2	Prosentase jangkauan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa (33.184 desa), daerah perbatasan Negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah blank spot (PLIK, M PLIK, Desa Pinter)	49,76%	39,04	56,38%
3	Prosentase penetrasi akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern yang mampu menghubungkan antar wilayah Indonesia (Backbone serat optik Palap Ring)	62% (306 Ibukota Kab/Kota)	30% (164 Ibukota Kab/Kota)	64.98% (323 Ibukota Kab/Kota)
4	Jumlah regulasi pembiayaan pembangunan ICT dan rencana pembangunan infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
5	Prosentase layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial (500 Desa Informasi)	3,2%	15,2%	16%
6	Prosentase Kabupaten/kota yang telah dilayani oleh penyelenggara layanan akses nirkabel pita lebar (BWA)	Belum beroperasi	-	Belum beroperasi
7	Prosentase penyelesaian peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos	60%	70%	80%
8	Prosentase (%) perkembangan industri	-	-	-

No.	Indikator Sasaran	2010	2011	
		Capaian	Target	Realisasi
	(manufaktur) penunjang TIK			
9	Prosentase (%) penyelenggaraan Rancangan Undang-Undang Konvergensi	50%	70%	80%
10	Jumlah SDM bidang kominfo yang terdidik dan terlatih sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik (CIO)	476 orang	500 orang	824 orang
11	Prosentase (%) fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan (KIM, media tradisional, media komunitas) yang tepat waktu dan akuntabel	-	65%	70%
12	Prosentase (%) aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat	-	100%	110%

### **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

**Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional adalah pelaksanaan advokasi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan K/L Pusat. Dari target yang ditetapkan sebanyak 15 K/L, telah terbentuk 51 PPID di K/L pusat (340%).**

### **Migrasi Sistem Penyiaran Dari Analog Ke Digital**

**Sejak penetapan Peraturan Menteri Kominfo No. 07 tahun 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia dimana standar yang dipilih untuk diadopsi adalah DVB-T, proses migrasi sistem penyiaran TV analog ke digital dimulai. Langkah awal yang diambil pemerintah cq. Kementerian Kominfo sejak perberlakuan Permen tersebut adalah dilakukannya serangkaian uji coba lapangan siaran TV digital di beberapa kota.**

### **Indeks Persepsi Korupsi**

**Melalui penerapan pakta integritas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta transparansi pelayanan terhadap masyarakat telekomunikasi dan informatika, maka berdasarkan survey integritas KPK, Kemkominfo tahun 2011 berada di rangking 9 dengan nilai indeks integritas adalah 7,43 dari rata-rata nilai indeks integritas nasional sebesar 6,31 dan rata-rata nilai indeks integritas instansi pusat 7,07.**